



## **PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DI KANTOR CAMAT PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO**

**Immanuel Tadanugi**

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sintuwu Maroso, Indonesia

---

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel*

---

#### *Kata Kunci:*

Pengambilan Keputusan,  
Pemerintahan

---

### **Abstrak**

Banyak permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga membutuhkan alternatif pemecahan masalah tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka pemecahan masalah tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu melihat apa yang menyebabkan sehingga masalah tersebut terjadi, maka pemimpin dituntut agar mampu sesegera mungkin mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Disinilah letak hubungan antara pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan, Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu akan diperhadapkan dengan pengambilan keputusan. Di samping itu peranan metode kerja staf dan peranan pengawasan sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Survey sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso adalah sudah maksimal/baik. Karena dalam setiap rapat pengambilan keputusan pimpinan selalu melibatkan para staf/bawahannya, didukung dengan respon para staf yang aktif dalam memberikan saran, pendapat/tanggapan dalam setiap analisa dan perumusan masalah.

## PENDAHULUAN

Inti kepemimpinan sebagai fungsi seorang pemimpin adalah mengambil keputusan yang setepat-tepatnya. Karena lalai, lengah atau terlambatnya melakukan tindakan pengambilan keputusan akan membuahkan kegagalan - kegagalan usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengambilan keputusan merupakan keharusan yang paling utama dari seorang pemimpin di dalam merealisasikan fungsi yang bermacam-macam dan semua aktivitas managerial yang dapat dianggap sebagai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tanggung jawab bersama antara pimpinan dan anggota-anggota organisasi yang ada. Namun dalam pengambilan keputusan yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan keputusan itu terletak pada pimpinan organisasi tersebut. Untuk dapat menggerakkan organisasi itu menuju arah yang telah ditetapkan secara mendasar sangat tergantung kepada kekuatan dan kemampuan pimpinan organisasi yang cakap dan terampil mengatasi berbagai masalah secara cepat, tepat dan praktis melalui pengambilan keputusan.

Untuk menghindari masalah yang akan muncul dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pemimpin instansi yang mampu mempengaruhi perilaku pegawainya (staf) sehingga mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dapat membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan yang efektif sesuai dengan tujuan tersebut.

Seorang pemimpin yang berhasil bukan saja dinilai dari kemampuan untuk melakukan kegiatan secara operasional melainkan dari kemampuannya dalam pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan praktis yang dibarengi pula kemampuannya menggerakkan orang - orang dalam hal ini stafnya yang merupakan unsur pembantu dalam melakukan kegiatan operasional itu guna meningkatkan efektivitas kerja sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Dari uraian - uraian di atas ini, jelas bahwa peranan pegawai staf dalam pengambilan keputusan adalah demikian pentingnya. Karena seperti diketahui bahwa kelompok staf dalam organisasi bertugas di samping menunjang dan melaksanakan kegiatan - kegiatan operasional, juga bertugas membantu pimpinan mempermudah tugasnya untuk mengambil keputusan.

Dalam kaitan dengan maksud tersebut, maka sebagaimana sering disebutkan dalam beberapa literatur bahwa metode yang baik untuk melibatkan atau menarik partisipasi bawahan/staf dalam proses pengambilan keputusan ialah metode kerja staf lengkap. Seperti yang dikatakan oleh Siagian (1983:45)

bahwa penerapan prinsip - prinsip metode kerja staf lengkap akan lebih meningkatkan efisiensi kerja pada setiap organisasi.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka seperti yang dikatakan oleh para ahli di bidang ini, bahwa dalam rangka pemecahan masalah, penerapan ide - ide/prinsip yang terkandung dalam metode kerja staf lengkap dapat memberikan sumbangan besar bagi manajemen demi kelancaran tugas, baik pada tingkat pengambilan keputusan maupun pada tingkat operasional (Siagian, 1978:73). Dengan pelaksanaan metode kerja staff lengkap diharapkan hasil pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dan dapat memecahkan masalah secara lebih efektif.

Jadi bila ide - ide ataupun prinsip - prinsip yang terkandung dalam metode kerja staf lengkap ini, sangat besar manfaatnya dalam rangka kelancaran manajemen khususnya pada tingkat pengambilan keputusan, maka tentu akan demikian pula halnya dengan proses pengambilan keputusan dalam organisasi - organisasi pemerintahan. Karena seperti diketahui bahwa organisasi - organisasi pemerintahan mempunyai lingkup tugas dan fungsi yang luas dengan berbagai masalah yang harus dipecahkan. Tetapi sejauh mana kebenaran anggapan - anggapan ini, tentu masih perlu dibuktikan lagi, hal ini masih ditentukan oleh situasi dan kondisi organisasi yang bersangkutan.

Peran staf pada kepemimpinan camat dalam proses pengambilan keputusan di kecamatan sangat menentukan. Untuk mengetahui sampai sejauh manakah peran staf dapat berperan memberi kontribusi dalam kepemimpinan camat dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan efektivitas kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu diadakan suatu penelitian ilmiah.

Selain metode kerja staf lengkap, dalam suatu organisasi pemerintahan, pengawasan diperlukan agar organisasi pemerintahan itu dapat bekerja secara efektif dan efisien serta ekonomis dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan

aparatur negara dalam melaksanakan tugas – tugas umum pemerintahan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena melalui pelaksanaan fungsi ini semua bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihindari.

Pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen dapat digunakan untuk mencegah terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

### **METODE PENELITIAN**

Instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah kuisisioner atau daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pada variabel penelitian, serta melakukan wawancara bebas maupun wawancara mendalam kepada sampel atau responden dan informan. Dasar penelitian ini adalah survey, yaitu yang dilakukan pada populasi yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan dan menggambarkan proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan itu. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan /menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang ada, dengan demikian teknik analisa data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam praktek sehari – hari seorang pemimpin diperhadapkan dengan berbagai macam masalah yang harus diselesaikan dan kadang – kadang memerlukan waktu yang relatif singkat untuk harus memutuskan sebuah keputusan. Situasi yang demikian ini sulit bagi pemimpin untuk mempunyai kesempatan berorientasi, beranalisa, hal mana tentu akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil.

Oleh karena itu seorang pemimpin diharapkan berada dalam kesiapan untuk mengambil keputusan, walaupun waktunya singkat. Untuk dapat memperoleh keputusan yang baik, seorang pemimpin harus sesegera mungkin menginstruksikan kepada para stafnya untuk mempersiapkan data/informasi yang aktual dengan penyusunan suatu sistem informasi untuk keputusan – keputusan (information decision

system). Istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan bagaimana informasi diolah, dipersiapkan dan dikembangkan agar sewaktu – waktu dapat disajikan untuk keperluan pembuatan keputusan dalam seluruh masalah organisasi. Sistem tersebut harus dirancang sebagai suatu proses komunikasi yang menghubungkan input yang diperlukan dengan informasi yang tersimpan dengan output keputusan yang dikehendaki.

Menurut Siagian (1980 : 79) peranan staf/bawahan itu adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumber informasi dan data. Karena keputusan itu dikatakan baik apabila keputusan itu didasarkan pada fakta – fakta dan data – data yang sangat erat hubungannya dengan suatu masalah yang dihadapi.
2. Sebagai persiapan pelaksana. Adalah suatu faktor psikologis yang penting pula untuk melibatkan para pimpinan tingkat bawah dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, jika para pimpinan pada tingkatan yang lebih rendah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka mereka itu akan merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pimpinan yang lebih tinggi di dalam organisasi adalah keputusan mereka juga karena mereka telah turut merumuskannya. Jika perasaan demikian itu ada, maka dapat diharapkan dalam bentuk sifat dan tingkat partisipasi mereka nantinya di dalam pelaksanaan akan lebih sesuai dengan keinginan pimpinan. Jadi akan mempermudah dan memperlancar pelaksanaan keputusan itu. Di samping itu rasa tanggungjawab mereka dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan akan bertambah besar pula.
3. Sebagai “kritikus”. Disadari atau tidak, salah satu sifat yang baik dan perlu dimiliki oleh seorang pemimpin adalah sifat keterbukaan terhadap kritik, baik kritik yang datang dari dalam organisasi maupun yang datang dari luar organisasi. Karena itu peranan para staf/bawahan sebagai kritikus (kritik yang sifatnya membangun) sangatlah penting karena biasanya sukar bagi seorang untuk mengkritik diri sendiri.

Karena mengingat tugas dan tanggungjawab camat begitu besar, maka stafnya harus disiagakan penuh untuk membantu camat dalam memberikan saran – saran, pertimbangan, usul – usul dan bahkan informasi – informasi yang aktual. Dengan demikian hasil dari output pengambilan keputusan dapat menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Berikut ini akan dikemukakan melancarkan proses pengambilan keputusan tanggapan/pernyataan responden terhadap melalui tabel berikut penerapan metode kerja staf lengkap dalam :

Tabel 1  
Frekuensi Tanggapan/Pernyataan Responden Terhadap Penerapan Prinsip Metode Kerja Staf Lengkap Dalam Melancarkan Proses Pengambilan Keputusan

No	Pernyataan	Frekuensi
1	Penerapan metode kerja staf lengkap selalu melancarkan proses pengambilan keputusan	5
2	Tidak selamanya melancarkan, tergantung jenis dan lingkup masalah	6
3	Kurang melancarkan proses pengambilan keputusan	0
4	Tidak melancarkan karena penerapannya rumit dan memakan waktu yang lama	0
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

Sumber : Data hasil penelitian, 2012

Dari tabel 16 di atas, menunjukkan bahwa 5 orang dari 11 orang responden menyatakan penerapan prinsip metode kerja staf lengkap selalu melancarkan proses pengambilan keputusan. Sedangkan 6 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa penerapan metode kerja staf lengkap tidak selamanya melancarkan proses pengambilan keputusan, tergantung jenis dan lingkup masalahnya.

Dari uraian di atas, jika dihubungkan dengan pendapat Siagian dalam bukunya Peranan Staf Management (1987 : 73), dia menjelaskan bahwa dalam usaha memecahkan masalah – masalah dalam pelaksanaan tugas, ide – ide yang ada dalam prinsip metode kerja staf lengkap ini

dapat memberikan sumbangannya yang tidak kecil artinya bagi manajemen demi kelancaran tugas, baik dalam tingkat pengambilan keputusan dan perumusan kebijaksanaan maupun pada tingkat operasional. Jadi kesimpulannya dengan penerapan metode kerja staf lengkap ini baik dalam melancarkan pelaksanaan tugas dan perumusan masalah dalam rangka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Selanjutnya akan dikemukakan hasil penelitian mengenai keterbukaan pimpinan dalam menerima saran dari para staf/bawahan dalam tabel berikut :

Tabel 2  
Pernyataan Responden Tentang Keterbukaan Pimpinan Dalam Menerima Saran

No	Pernyataan	Frekuensi
1	Pimpinan selalu terbuka dalam menerima saran/tanggapan staf/bawahan	7
2	Pimpinan memberikan kesempatan hanya kepada staf/bawahan yang berurusan langsung dengan masalah yang dibahas	4
3	Pimpinan jarang terbuka dalam menerima saran staf/bawahan	0
4	Pimpinan tidak memberikan kesempatan yang terbuka dalam menerima saran/tanggapan staf/bawahan	0
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

Sumber : Data hasil penelitian, 2012

Dari data di atas terlihat bahwa 7 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan pimpinan selalu terbuka dalam menerima saran/tanggapan staf/bawahan. Sedangkan 4 orang dari jumlah responden yang

sama menyatakan bahwa pimpinan hanya memberikan kesempatan kepada staf/bawahan yang berurusan langsung dengan masalah yang dibahas.

Dari uraian di atas, jika dihubungkan dengan pendapat Siagian (1983 : 51) pimpinan organisasi lebih menyadari bahwa tujuan organisasi akan tercapai dengan lebih cepat, efisien, efektif dan ekonomis apabila kemampuan mempergunakan staf lebih ditingkatkan. Jadi kesimpulannya pimpinan harus terbuka dalam memberikan kesempatan kepada staf untuk memberikan saran/tanggapan mengenai alternatif pemecahan dan perumusan masalah dalam proses

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Selanjutnya akan dikemukakan bagaimana kesiapan staf dalam menyiapkan data dan informasi apabila menghadapi rapat pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan dan perumusan alternatif, yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Frekuensi Tanggapan/Pernyataan Responden Apabila Menghadapi Rapat Pengambilan Keputusan (Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Dan Perumusan Alternatif)

No	Pernyataan	Frekuensi
1	Staf selalu mempersiapkan data dan informasi sesuai dengan jenis dan posisi masalah yang hendak dicapai	8
2	Mempersiapkan data dan informasi hanya apabila masalah yang dibahas berkaitan dengan bidang kerjanya	3
3	Kadang – kadang saja mempersiapkan data dan informasi lebih dahulu	0
4	Tidak pernah mempersiapkan data dan informasi lebih dahulu	0
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

Sumber : Data hasil pengamatan, 2012

Dari data yang tertera dalam tabel 18 di atas, menunjukkan bahwa 8 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan staf/pegawai selalu mempersiapkan data dan informasi sesuai dengan jenis dan posisi masalah yang hendak dicapai. Sedangkan 3 orang dari jumlah responden yang diwawancarai menyatakan bahwa staf/pegawai mempersiapkan data dan

informasi hanya apabila masalah yang dibahas berkaitan dengan bidang kerjanya.

Selanjutnya akan dikemukakan tentang struktur organisasi termasuk didalamnya pembagian tugas kerja sekarang ini sudah efektif dan efisien sehingga dalam pelaksanaan tugas kerja serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan lancar. Melalui tabel berikut :

Tabel 4

Pernyataan Responden Tentang Struktur Organisasi Termasuk Didalamnya Pembagian Tugas – Tugas Kerja Sekarang Ini Sudah Efektif Dan Efisien Sehingga Dalam Pelaksanaan Tugas Kerja Serta Pelayanan Kepada Masyarakat Dapat Berjalan Dengan Lancar

No	Pernyataan	Frekuensi
1	Sangat efektif dan efisien	3
2	Efektif dan efisien	8
3	Tidak efektif dan efisien	0
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

Sumber : Data hasil penelitian, 2012

Dari data yang tertera dalam tabel tadi, menunjukkan bahwa 3 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan struktur organisasi dan pembagian tugas saat ini sangat efektif dan efisien. Sedangkan 8 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa struktur organisasi dan pembagian tugas saat ini efektif dan efisien.

Dari uraian di atas, jika dihubungkan dengan pendapat Siagian (1982 : 51) pimpinan organisasi menyadari bahwa tujuan organisasi akan tercapai dengan lebih cepat, efisien, efektif dan ekonomis apabila kemampuan para staf lebih ditingkatkan. Jadi kesimpulannya adalah seorang pimpinan dalam penempatan para staf sebagai kepala – kepala seksi termasuk pembagian tugas

dalam organisasi, haruslah efektif dan efisien. Karena itu sangat menentukan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pemerintahan Di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Berikut ini akan dikemukakan hasil penelitian mengenai tata cara atau metode kerja

saat ini telah efektif dan efisien sehingga aparat pemerintah kecamatan Pamona Selatan dalam menyelesaikan tugasnya berjalan dengan efektif dan efisien. Data tersebut akan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5

Pernyataan Responden Tentang Tata Cara Atau Metode Kerja Sekarang Ini, Apakah Aparat Pemerintah Kecamatan Pamona Selatan Dalam Menyelesaikan Pekerjaan Dapat Berjalan Dengan Efektif Dan Efisien

No	Pernyataan	Frekuensi
1	Sangat efektif dan efisien	2
2	Efektif dan efisien	9
3	Tidak efektif dan efisien	0
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

Sumber : Data hasil penelitian, 2012

Dari data di atas terlihat bahwa 2 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan bahwa tata cara atau metode kerja saat ini sudah sangat efektif dan efisien. Sedangkan 9 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa tata cara atau metode kerja saat ini telah efektif dan efisien.

Dari uraian di atas, jika dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr. Veithzeal Rivai, MBA peranan struktur kepemimpinan adalah Aligned (penyelaras) atau memastikan bahwa struktur,

sistem, dan proses operasional organisasi memberi dukungan terhadap visi dan misi organisasi. Jadi kesimpulannya adalah seorang pemimpin dalam menyusun tata cara atau metode kerja harus benar – benar efektif dan efisien. Karena keberhasilan dari suatu pekerjaan tergantung dari bagaimana cara atau metode kerja yang digunakan.

Berikut ini akan dikemukakan hasil penelitian mengenai kebijakan yang dibuat oleh atasan dalam rangka pelaksanaan tugas. Data tersebut dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 6

Pernyataan Responden Tentang Kebijakan Yang Dibuat Oleh Atasan Dalam Pelaksanaan Tugas

No	Pernyataan	Frekuensi
1	Sangat baik	4
2	Baik	6
3	Cukup baik	1
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

Sumber : Data hasil penelitian, 2012

Dari data yang tertera dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa 4 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh atasan dalam rangka pelaksanaan tugas adalah sangat baik. Dan 6 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh atasan dalam rangka pelaksanaan tugas adalah baik. Sedangkan 1 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh atasan dalam rangka pelaksanaan tugas telah cukup baik.

Dari uraian di atas, jika dihubungkan dengan Inpres No 15 Tahun 1983 yaitu ada 6 unsur pelaksanaan pengawasan melekat, yang diantaranya adalah kebijakan. Jadi kesimpulannya adalah keberhasilan dari suatu organisasi juga terletak pada kebijakan pimpinan organisasi pemerintahan Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Selanjutnya akan dikemukakan tentang rencana kerja yang dibuat oleh atasan dalam rangka pelaksanaan tugas, melalui tabel berikut :

Tabel 7

Pernyataan Responden Tentang Rencana Kerja Yang Dibuat Oleh Atasan Dalam Pelaksanaan Tugas

No	Pernyataan	Frekuensi
1	Selalu memberikan informasi	8
2	Kadang –kadang memberikan informasi	3
3	Tidak memberikan informasi	0
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

Sumber : Data hasil penelitian, 2012

Dari tabel 24 di atas terlihat bahwa 8 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan bahwa atasan selalu memberikan informasi mengenai rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas. Sedangkan 3 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa atasan tidak selamanya memberikan informasi atau hanya kadang – kadang saja memberikan informasi mengenai rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.

Dari uraian di atas, jika dihubungkan dengan pendapat George Terry tentang fungsi management yaitu diantaranya adalah planning atau perencanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam menyusun rencana kerja harus memberikan informasi kepada para bawahan/stafnya mengenai rencana kerja yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien yang dilakukan oleh atasan dalam pelaksanaan tugas para staf. Data tersebut dapat kita lihat dalam tabel 27 berikut :

Tabel 8

Pernyataan Responden Tentang Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Atasan Dalam Pelaksanaan Tugas

No	Pernyataan	Frekuensi
1	Selalu melakukan pembinaan	8
2	Kadang – kadang melakukan pembinaan	3
3	Tidak melakukan pembinaan	0
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

Sumber : Data hasil penelitian, 2012

Dari data yang tertera dari tabel di atas, menunjukkan bahwa 8 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan bahwa atasan selalu melakukan pembinaan kepada para staf dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan 3 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa atasan kadang melakukan pembinaan kepada para staf dalam pelaksanaan tugas.

Dari uraian di atas, jika dihubungkan dengan pendapat Prof. R.S.Tangkudung, bahwa pengawasan melekat adalah suatu alat manajemen untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan berbagai kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jadi kesimpulannya pimpinan harus selalu memberikan pembinaan kepada para staf/bawahannya agar mereka dapat meningkatkan kualitas kerjanya dalam rangka pelaksanaan tugas yang efisien dan efektif.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses pengambilan

keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso adalah baik. Karena dalam setiap rapat pengambilan keputusan pimpinan selalu melibatkan para staf/bawahannya, didukung dengan respon para staf yang aktif dalam memberikan saran, pendapat/tanggapan dalam setiap analisa dan perumusan masalah. Sehingga dalam pelaksanaan tugas mereka berjalan dengan baik dan boleh selesai tepat pada waktunya serta hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan atasan dan masyarakat.

Penerapan metode kerja staf lengkap dengan prinsip – prinsip yang terkandung di dalamnya adalah penting dalam rangka melancarkan proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip metode kerja staf lengkap ini sangat penting terutama dalam organisasi – organisasi besar seperti organisasi pemerintahan, dengan berbagai macam masalah yang perlu segera dipecahkan. Dalam organisasi yang demikian ini, tidaklah mungkin pemecahan – pemecahan masalah dapat dilaksanakan sendiri oleh pimpinan

tanpa melalui bantuan orang lain atau para stafnya. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan staf terhadap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso adalah baik.

Penerapan prinsip metode kerja staf lengkap dalam proses pengambilan keputusan akan mendorong semangat kerja para staf/bawahan untuk melaksanakan hasil dari keputusan yang dibuat. Singkatnya walaupun prinsip yang terkandung dalam metode kerja staf lengkap ini belum sepenuhnya diterapkan dalam semua proses pengambilan keputusan di Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso, akan tetapi ide – ide yang terkandung dalam metode kerja staf lengkap ini setidaknya lebih mendorong semangat staf/bawahan di dalam pelaksanaan hasil keputusan.

Hendaknya dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso memperhatikan masukan – masukan dari para staf pegawai seperti yang terdapat dalam metode kerja staf lengkap. Dengan demikian keputusan yang diambil lebih dapat efektif dilaksanakan dan dapat ditunjang oleh para staf pegawai karena keputusan tersebut sudah merupakan keputusan bersama sehingga mereka akan lebih menunjang keputusan tersebut dalam pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo Prajudi, 1984. *Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Seri Pustaka Ilmu Administrasi.
- Bohari, M. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Burhanuddin, 1994. *Analisa Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta, Bina Aksara
- Efendi Onong, u. 1981. *Kepemimpinan Dan Konsultasi*. Bandung, Alumni.
- Handayaniinggrat, Soewarno, 1982. *Pengantar Studi Administrasi Dan Manajemen*. Gunung Agung, Jakarta.
- Ibnu Syamsi, 1989. *Pengambilan Keputusan (Decision Making)*. Jakarta, Bina Aksara.
- Kartini Kartono, 1086. *Pimipinan Dan Kepimimpinan*. Bandung, Rajawali.
- Manullang M, 1989. *Methodology Research Pengantar Metoe Ilimiah*. Tarsito Bandung.
- Pamudji S, 1986. *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta, Aksara Baru.
- Nawawi, H. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Univerity Press, Cetakan Ke-10
- Siagian SondangP, 1983. *Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi*. Jakarta, Gunung agung.